



**PENETAPAN**

Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Rh.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Rh. tanggal 25 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2003 Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Napabalano, wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 21 tahun,

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Rh.



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Dahlan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dengan maskawin berupa 88 real senilai Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama Taring;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Anak 1, umur 12 tahun;
  2. Anak 2, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 3 Maret 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalan, Kabupaten Muna;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PARh.



Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 2003 di Kelurahan Napabalano wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Raha untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Raha selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya. Selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perbaikan selanjutnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Maret 2003;

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PARh.



- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
  - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung setempat bernama Taring;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dahlan;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
  - Bahwa maharnya berupa uang 88 real senilai dengan Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Maret 2003;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
  - Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung setempat bernama Taring;

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PARh.



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dahlan;
- Bahwa yang menjadi saksi pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa maharnya berupa uang 88 real senilai dengan Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Rh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditekankan adanya pengumuman dimaksud, dan hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, tidak ada keberatan dari pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Raha dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2003 di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2003 di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna adalah sah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2, dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PARh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh imam kampung setempat bernama Taring pada tanggal 3 Maret 2003 di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dahlan dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dan maharnya berupa uang 88 real senilai Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Maret 2003 di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung setempat bernama Taring dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dahlan dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2 dan maharnya berupa uang 88 real senilai Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesusuan;

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PARh.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA Rh.





sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2003 di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PARh.



Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalamo, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalamo, Kabupaten Muna;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PARh.



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh: Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh La Mahana, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	125.000,00	
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	216.000,00	(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PARh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2017/PARh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)